

**PENELITIAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
(STUDI KASUS DI DESA CISAGA, KECAMATAN CISAGA,
KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT)**

¹Aris Sudomo

¹Balai Penelitian Teknologi Agroforestry, Jl. Raya Ciamis-Banjar Km 4, Po. BOX 5 Ciamis 46201.
Email : arisbpkc@yahoo.com

Abstrak. Dinas Kehutanan Ciamis didukung oleh ITTO (International Tropical Timber Organization) mengimplementasikan kegiatan “Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Melibatkan Masyarakat Lokal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian study kasus. Lokasi penelitian adalah di Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama 2,5 bulan antara Agustus s/d Oktober 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persiapan sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan RHL di Desa Cisaga berlangsung melalui: (1) sosialisasi; (2) pendampingan pembentukan Kelompok Tani, (3) peningkatan kapasitas dengan pelatihan kelompok tani dan (4) bantuan permodalan dan sarana fisik. Tingkat partisipasi masyarakat Kelompok Tani Sejahtera di Desa Cisaga dalam pelaksanaan kegiatan RHL adalah rendah (tidak berpartisipasi dan pasif) sebesar 47,37%, sedang (material dan fungsional) sebesar (15,79%) dan tinggi (mobilisasi diri) sebesar 36,84%.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

1. Pendahuluan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berbasis partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan kehutanan. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan ini salah satu upaya memotivasi tumbuhnya kesadaran dan perhatian seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan perbaikan lingkungan agar fungsi sumber daya hutan dapat berkembang secara produktif dan optimal. Hal ini berarti bahwa aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan ekosistem integralistik yang terkait satu sama lain.

Studi empiris banyak menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan ataupun pembangunan tidak dapat memenuhi sarannya akibat kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam pendekatan partisipatoris pengelolaan pembangunan dapat dipahami dalam dua makna. Pertama, pendekatan partisipatoris sebagai metode untuk memberdayakan komunitas, dengan tujuan untuk memampukan komunitas sebagai pelaku pemecahan masalah dan pemenuhan atas kebutuhan atas diri mereka sendiri.

Kedua, pendekatan partisipatoris sebagai metode untuk mengembangkan interkoneksi multipihak dalam pengelolaan pembangunan, yang dari kolaborasi itu terlahirkan inovasi/ fitur baru yang menjamin sustainability suatu tatanan dalam menghadapi perubahan (PSKMP, 2002).

Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Dinas Kehutanan Ciamis telah berinisiatif mengajukan proposal kerjasama dengan *International Tropical Timber Organization* (ITTO) untuk RHL berbasis partisipasi masyarakat lokal di Kabupaten Ciamis. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut : (1) Kabupaten Ciamis dengan jumlah penduduk 1.602.682 jiwa dan kepadatan penduduk di sekitar DAS Citanduy \pm 833 orang/km², sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani (44%) sehingga sangat tergantung pada keberadaan hutan dan lahan yang ada, (2) Luas areal hutan di Kabupaten Ciamis 35.007,88 ha dengan 80% lahan merupakan lahan kritis dan lahan tidak produktif yang berada di hutan rakyat (Anonim, 2008).

Pemerintah Kabupaten Ciamis didukung oleh ITTO telah mengimplementasikan kegiatan “Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melibatkan Masyarakat Lokal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat” pada tahun 2006 s/d 2008”. Tujuan pembangunan kehutanan tersebut adalah untuk mempromosikan manajemen kelestarian terhadap hutan dan lahan kritis melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi untuk keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan. Tujuan khusus kegiatan tersebut adalah: (1) untuk memapankan Rehabilitasi Hutan Lahan melalui partisipasi masyarakat lokal dan (2) untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal untuk melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis (Anonim, 2008). Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis berbasis komunitas adalah suatu proses untuk mendorong perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang lebih mengandalkan partisipasi masyarakat sehingga dapat berkelanjutan (Sukrianto, 2007). Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat”.

2. Metode Penelitian

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama 2,5 bulan antara bulan Agustus s/d Oktober 2010.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan sesuai dengan tujuan, metode penelitian dan analisis yang digunakan. Jenis data primer yang dikumpulkan meliputi:

1. Data mengenai karakteristik sosial ekonomi kelompok tani peserta RHL kritis, yang meliputi: kondisi sosial demografi (umur responden, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga) dan kondisi ekonomi (pendapatan dan pengeluaran perbulan)
2. Data mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL kritis. Data ini meliputi keterlibatan petani hutan dalam RHL, keaktifan bertanya

dalam pertemuan, permintaan pendapat oleh dinas dalam kegiatan/pertemuan, mengeluarkan ide/usul pada rapat, usul/ide petani diterima dan dilaksanakan, pengetahuan petani tentang tujuan kegiatan, sumbangan dana, tenaga pada pelaksanaan, diskusi dalam kelompok tani yang hasilnya disampaikan ke Dinas Kehutanan Ciamis, diskusi antara kelompok tani dengan Dinas Kehutanan Ciamis tentang kegiatan selain yang ditetapkan Dinas kehutanan Ciamis, rencana dibuat oleh kelompok tani, kelompok tani memanggil penyuluh dan apakah kegiatan RHL sesuai dengan keinginan/kebutuhan masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan RHL dikumpulkan data mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pengangkutan dan penanaman bibit, persetujuan, ketertarikan terhadap kegiatan, pernah mengikuti penyuluhan, memberikan bantuan/saran pendapat terhadap kegiatan RHL kritis (kuesioner terhadap kelompok tani). Data tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari informan (aparatur desa, pemuka masyarakat, kelompok tani hutan, Dinas Kehutanan Ciamis dan ITTO tentang pendapat mereka terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Informan yang dipilih yaitu 1. Ketua kelompok Tani (1 orang), 2. Ketua RT, 3. Ketua RW, 4. Aparatur Desa (2 orang) 6. Penyuluh (2 orang), 7. Anggota kelompok tani (2 orang), 8. Guru/ Pengajar (1 Orang), serta 9. Dinas Kehutanan dan ITTO. Dalam rangka mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL maka dilakukan wawancara dengan daftar kuisisioner yang diberikan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Sejahtera di Desa Cisaga (19 orang) sebagai responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan. Hal ini disebabkan karena unit analisis penelitian tingkat partisipasi adalah anggota kelompok tani di desa model yang menjadi sasaran proyek Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis dan ITTO PD. 271/04 REV. 3 (F), yaitu KT Sejahtera (Anonim, 2008). Oleh karena itu pemilihan responden berupa anggota Kelompok Tani Sejahtera disebabkan karena kelompok tani tersebut merupakan binaan Dinas Kehutanan Ciamis dalam rangka pelaksanaan kegiatan RHL dengan melibatkan masyarakat. Kelompok tani sebagai wadah partisipasi masyarakat di Desa Cisaga dalam pelaksanaan kegiatan RHL bersama masyarakat lokal, sehingga keterwakilan masyarakat di Desa Cisaga untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan RHL dapat dilihat dari masyarakat yang menjadi anggota kelompok tani tersebut.

2.4. Teknik Analisis Data

Moleong. L.J, (1995) data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan kondisi umum lokasi penelitian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL. Untuk menjawab pertanyaan penelitian (Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL?) maka analisisnya lebih diperkaya dengan analisis statistik deskriptif sederhana terhadap jawaban responden dalam bentuk tabulasi. Selanjutnya dikelompokkan dan dihitung persentase dari jumlah responden pada setiap tingkatan partisipasi. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat secara umum dalam pelaksanaan kegiatan RHL kritis digunakan rumus (Kadir. W, 2007) :

$$UP = \frac{\sum X_{ij}(ya)}{NS} \times 100\%$$

Dimana :

UP = Ukuran Partisipasi Masyarakat

X_{ij} = Jumlah nilai yang menjawab ya pertanyaan ke-i dan responden ke-j

NS = Nilai Sebenarnya/Seharusnya dari jawaban responden

Selanjutnya nilai UP didefinisikan dengan menggunakan pendekatan kategori yang dikembangkan oleh Babbie (1991) dalam Kadir.W (2007) yang telah dimodifikasi sebagai berikut :

Nilai UP > 66,68 % : Partisipasi Tinggi

Nilai UP 33,34 % - 66,67 % : Partisipasi Sedang

Nilai UP < 33,33 % : Partisipasi Rendah

Selain mengukur tingkat partisipasi masyarakat secara umum dalam pelaksanaan kegiatan RHL kritis, juga dilakukan pengukuran tingkat partisipasi masyarakat mengacu pada teori yang dikemukakan oleh (Pretty, 1995 dalam Salman, 2005) yaitu mulai dari partisipasi manipulatif sampai pada partisipasi mandiri/mobilisasi. Tingkatan partisipasi manipulatif sampai pada partisipasi passif dikategorikan sebagai tingkat partisipasi masyarakat rendah. Tingkatan partisipasi konsultatif sampai pada partisipasi fungsional dikategorikan sebagai tingkat partisipasi masyarakat sedang/menengah. Sedangkan Tingkatan partisipasi interaktif sampai pada mobilisasi diri dikategorikan sebagai tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, terlebih dahulu dibuat kriteria pada setiap tingkatan partisipasi seperti yang tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Kriteria yang Digunakan dalam RHL kritis

Tingkat Partisipasi	Kriteria
Partisipasi Manipulatif	- Masyarakat dipaksa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan RHL kritis
Partisipasi Passif	- Masyarakat hanya datang, duduk dan diam pada setiap pertemuan/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Ciamis - Masyarakat hanya melaksanakan apa yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan Ciamis
Partisipasi Konsultatif	- Masyarakat memberikan usul atas kegiatan yg akan dilaksanakan - Usul yang diberikan bisa diakomodir oleh Dinas Kehutanan Ciamis
Partisipasi Material	- Masyarakat ikut terlibat menyumbangkan tenaga dan atau dana dalam pelaksanaan kegiatan RHL kritis
Partisipasi Fungsional	- Masyarakat mefungsikan KTH yang telah ada untuk membahas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Ciamis
Partisipasi Interaktif	- Masyarakat baik secara perwakilan dalam KTH atau keseluruhan bersama-sama dengan Dinas kehutanan Ciamis merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan
Mobilisasi diri	- Masyarakat mampu merencanakan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan melalui KTH yang ada - Mampu menjalin kontak dengan lembaga luar untuk dukungan sumberdaya dan bimbingan teknis - Dinas Kehutanan Ciamis hanya menyiapkan kerangka kegiatan secara umum

2. Hasil dan Pembahasan

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan RHL yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Ciamis dan ITTO menjadi tolak ukur keberlanjutan. Menurut Salman, (2005) dengan partisipasi selama pelaksanaan kegiatan RHL berlangsung akan menjadi sarana proses belajar sosial dan belajar berdasar pengalaman sehingga mengalami

peningkatan kapasitas untuk menumbuhkan prakarsa dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL tersebut. Data sosial ekonomi masyarakat yang dijadikan responden dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Sosial Ekonomi Responden Anggota KT Sejahtera

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Jumlah keluarga	Jenis kelamin	Penghasilan (Rp.)	Pengeluaran/bulan (Rp.)
1	Dede Ajat	53	Tukang Kayu	SLTA	4	L	700.000-1000.000	800.000
2	Tumin Buana	50	Petani	SD	2	L	> 1.000.000	1.200.000
3	Ikun	45	Petani	SD	3	L	500.000-700.000	600.000
4	Een Enah	28	Wiraswasta	SLTP	3	P	>1.000.000	1.500.000
5	Rosad A. Haqim	42	Perangkat Desa	SLTA	4	L	>1.000.000	1.500.000
6	Nurhayati	41	Perangkat Desa	SLTA	4	P	>1.000.000	3.000.000
7	Jana Sujana	40	Wiraswasta	SD	2	L	500.000-700.000	500.000
8	Eno Sumarna	58	Wiraswasta	SMP	2	L	>1.000.000	1.200.000
9	Rohaeti	30	Petani	SMP	4	P	500.000-700.000	600.000
10	Keni	50	Petani	SD	2	P	7000.000-1.000.000	600.000
11	Nana Herdiana	48	Wiraswasta	SD	3	L	7000.000-1.000.000	700.000
12	Delon H.	46	Buruh	SD	4	L	7000.000-1.000.000	900.000
13	Rudi	39	Buruh dan Wiraswasta	SLTP	3	L	>1.000.000	>1000.000
14	A. Wawan Gunawan	45	Perangkat Desa	SLTA	4	L	>1.000.000	700.000
15	Ina Nuryani	27	Perangkat Desa	SLTA	3	P	>1.000.000	1.000.000
16	Usup Syamsudin	65	Perangkat Desa	D3	5	L	>1.000.000	900.000
17	H. Herry Suhendar	54	PKL	S1	5	L	>1.000.000	1.000.000
18	D. Supriadi	38	Petani	SPMA	3	L	500.000-700.000	700.000
19	Herman	40	Petani	SLTA	4	L	500.000-700.000	700.000

Sumber: Kelompok Tani Sejahtera, (2009) dan Data primer diolah, (2010).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kelompok tani yang terlibat dengan pelaksanaan kegiatan RHL kritis (57,89%) dan selebihnya (42,11%) tidak pernah terlibat kegiatan tersebut. Masyarakat Kelompok Tani Sejahtera yang terlibat kebanyakan adalah para pengurusnya yang sebagian besar adalah aparat pemerintah desa. Hal ini sangat memungkinkan karena setiap kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Ciamis dan ITTO akan melalui pemerintah desa sehingga akses informasi mudah didapatkan. Kegiatan yang diikuti oleh pengurus kelompok tani yang terlibat kegiatan RHL kritis adalah mulai dari sosialisasi, pelatihan, pembentukan kelompok tani dan pembuatan proposal. Sedangkan anggota kelompok tani yang terlibat kebanyakan hanya sebagai buruh untuk kegiatan fisik yaitu pekerjaan RHL kritis mulai dari pembibitan sampai penanaman. Adanya masyarakat anggota KT Sejahtera yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RHL kritis menunjukkan kurang solidnya KT Sejahtera tersebut dalam menggalang dan mengkoordinir anggotanya. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat sehubungan dengan ketidakterlibatannya dalam kegiatan RHL kritis diantaranya karena tidak pernah diundang atau tidak diberi tahu. Oleh karena itu upaya melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam setiap kegiatan yang diadakan menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Persepsi masyarakat yang meliputi tingkat pengetahuan, penerimaan, dan nilai manfaat dari kegiatan RHL kritis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Persepsi Masyarakat terhadap Kegiatan RHL Kritis

Persepsi masyarakat terhadap kegiatan RHL	Jumlah Responden	Persentase (%)	
		Ya	Tidak
Apakah Bapak/Ibu mengerti tujuan kegiatan RHL?	19	89,47	10,53
Apakah kegiatan RHL sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat	19	84,21	15,79
Apakah ada manfaat ekonomi/penambahan penghasilan dengan kegiatan RHL bagi masyarakat	19	100,00	0,00

Sumber : Data primer diolah, 2010

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat KT Sejahtera mengerti tujuan diadakannya kegiatan RHL kritis bersama masyarakat. Semua masyarakat yang terlibat dalam kegiatan RHL mengerti tujuan kegiatan RHL kritis sedangkan yang tidak terlibat sebagian besar juga mengerti tujuan kegiatan tersebut. Hal ini berarti pemahaman masyarakat yang terlibat maupun yang tidak terlibat kegiatan RHL kritis sudah relatif baik.

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan RHL kritis relatif tinggi. Hal ini berarti kegiatan RHL kritis dengan melibatkan masyarakat, secara umum diterima oleh masyarakat lokal (*social acceptable*). Hal ini ditunjukkan oleh tidak terdapat kendala yang bertentangan dengan adat dan budaya masyarakat untuk melakukan kegiatan RHL kritis. Kendala yang dihadapi masyarakat kebanyakan berkaitan dengan kurangnya permodalan dan dana untuk melakukan kegiatan. Alasan yang disampaikan oleh sebagian kecil masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dikarenakan tidak mempunyai hutan dan lahan kritis dan mereka bergerak di sektor pertanian bukan kehutanan.

Kegiatan RHL bersama masyarakat ternyata memberikan keuntungan ekonomi dengan penambahan penghasilan masyarakat. Menurut informan anggota kelompok tani, kegiatan RHL ini membuka lapangan kerja yaitu pekerjaan sebagai buruh dan juga memberikan kesempatan kerja dan usaha di bidang kehutanan. Menurut masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan pembangunan hutan rakyat bisa menghasilkan kayu untuk tabungan di masa depan, di mana sewaktu-waktu memerlukan biaya untuk sekolah anak, hajatan dan lain-lain. Hal tersebut di atas menunjukkan adanya aspek *economic available* dari kegiatan RHL bersama masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL di Desa Cisaga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil skoring tingkat partisipasi masyarakat dimana 63,16 % masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang rendah dan 36,84 % berada pada tingkat partisipasi tinggi. Partisipasi tinggi sebesar 36,84% berasal dari pengurus kelompok tani yang sebagian besar adalah aparat pemerintah Desa Cisaga sedangkan kebanyakan anggota kelompok tani berpartisipasi rendah. Hal ini menunjukkan adanya dominasi partisipasi yang dilakukan oleh sebagian pengurus kelompok tani yaitu elit lokal sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat petani miskin rendah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL di Desa Cisaga dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan RHL

Hasil Skoring	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persentase (%)
0 – 33,33 %	Partisipasi rendah	63,16
33,34 – 66,67 %	Partisipasi sedang	-
66,68 – 100 %	Partisipasi tinggi	36,84

Sumber : Data primer diolah, 2010

Hasil penelitian ini apabila dihubungkan dengan tingkat partisipasi masyarakat seperti dikemukakan oleh Pretty (1995) dalam Salman (2005), tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL kritis di Desa Cisaga secara umum rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL disebabkan oleh dominasi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan RHL oleh pengurus-pengurus kelompok tani yang sebagian besar diisi oleh aparat pemerintahan desa. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan pengurangan peran aparat desa dalam pelaksanaan teknis pembangunan dan mengembalikan fungsinya sebagai fasilitator masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai administrasi lokal dalam program pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan RHL Kritis (Pretty, (1995) dalam Salman, (2005)

Tingkat Partisipasi (Responden = 19 Orang)	Persentase (%)	Persentase (%)	Kategori Partisipasi
Tidak berpartisipasi	42,11	47,37	Rendah
Partisipasi manipulative	0,00		
Partisipasi passif	5,26		
Partisipasi konsultatif	0,00	15,79	Sedang
Partisipasi material	10,53		
Partisipasi fungsional	5,26		
Partisipasi interaktif	0,00	36,84	Tinggi
Partisipasi mobilisasi diri	36,84		

Sumber : Data primer diolah, 2010

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan karena pada sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan seperti pelatihan, sosialisasi dan bentuk kegiatan pembibitan hingga penanaman, tidak semua masyarakat ikut dilibatkan. Kegiatan pelatihan biasanya dilakukan dengan sistem perwakilan dimana Kelompok Tani Sejahtera diwakili oleh 2-4 orang, yang terdiri dari para pengurus kelompok tani yang sebagian besar berasal dari aparat pemerintah desa. Begitupun dalam kegiatan fisik, umumnya yang terlibat hanya anggota kelompok tani yang berprofesi sebagai buruh yang terlibat dalam pekerjaan pembibitan hingga penanaman. Sistem perwakilan seperti ini dikeluhkan oleh sebagian masyarakat karena pada dasarnya mereka ingin terlibat tetapi tidak pernah diundang sehingga tidak tahu. Walaupun bukan berarti setiap anggota harus terlibat dalam semua kegiatan yang diadakan Dinas Kehutanan Ciamis dan ITTO, namun ketidaktahuan dari sebagian besar masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi RHL kritis mengakibatkan partisipasi masyarakat rendah. Hal ini berimbas pada tidak tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Salman (2005), partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan akan mengkondisikan proses belajar bagi komunitas dan menciptakan efek-efek spesifik bagi masyarakat.

Menurut Soetomo (2006), sistem pengelolaan sumber daya yang mengacu pada pola yang sudah ditetapkan secara terpusat mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi sangat terbatas, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu relevan dengan persoalan dan kebutuhan lokal, demikian juga manfaat dari program sebagai hasil keputusan tadi. Secara makro, mobilisasi sumberdaya telah berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan, namun demikian hal itu telah menyebabkan terjadi konsentrasi peningkatan

produktivitas dan pendapatan di satu pihak atau pada kelompok tertentu, sedangkan di lain pihak, justru terjadi marginalisasi pada kelompok masyarakat yang lain. Pendekatan pembangunan yang sentralistik dan seragam menyebabkan hasil – hasilnya tidak menyentuh masyarakat lapisan bawah (Soetomo, 2006).

Masyarakat yang tergolong dalam partisipasi pasif hanya terlibat dalam kegiatan sebatas keanggotaan tanpa ada kontribusi pendapat, ide, dan usulan karena menganggap sudah ada keterwakilan oleh para pengurus kelompok tani. Dominasi para pengurus kelompok tani yang kebanyakan para aparat desa menyebabkan mereka sekedar ikut, segan, dan takut untuk menyampaikan keinginannya. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya pertemuan rutin kelompok sehingga setiap ada kegiatan yang memutuskan adalah hanya sebagian dari pengurus kelompok tani yang sebagian besar aparat pemerintah desa.

Masyarakat yang tergolong dalam partisipasi material umumnya mereka terlibat dalam kegiatan sebagai buruh untuk pekerjaan pembuatan bibit, pembangunan persemaian, penanaman dan pemeliharaan tanaman kehutanan. Masyarakat selama ini hanya dapat menyumbangkan tenaga sebagai buruh sehingga mendapatkan bayaran dalam partisipasi yang mereka lakukan dalam pelaksanaan RHL kritis. Namun demikian mereka merasa senang dengan adanya kegiatan RHL kritis karena bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh tersebut.

Masyarakat yang tergolong dalam partisipasi fungsional umumnya selain berkontribusi dalam menyumbang tenaga dalam kegiatan mereka juga terlibat dalam kegiatan pembentukan AD/ART kelompok tani. Pada KT Sejahtera, hal ini hanya diikuti oleh sebagian kecil anggota, karena sebagian yang lain banyak yang tidak terlibat atau tidak berpartisipasi. Dengan partisipasi tingkat fungsional, minimal terjadi proses pembelajaran dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembentukan AD/ART.

Masyarakat yang tergolong dalam partisipasi mobilisasi diri adalah yang terlibat, mengemukakan ide/pendapat, bertanya tentang pelaksanaan kegiatan, membahas kegiatan dalam kelompok tani dan pihak pengelola proyek, terlibat pembuatan AD/ART, proposal, berkontribusi tenaga/dana dan memanggil pihak luar untuk membantu kelompok tani. Hal ini sebagian besar dilakukan oleh pengurus KT Sejahtera yang sekaligus menjadi aparat Pemerintah Desa Cisaga. Menurut Soetomo (2006), dengan pemberdayaan diharapkan akan dapat meningkatkan akses kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap fasilitas dan pelayanan, akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan posisi tawar, serta mengurangi eksploitasi oleh kelompok lain.

Rendahnya partisipasi pada sebagian besar masyarakat diantaranya disebabkan oleh dominasi partisipasi oleh aparat pemerintah desa dan yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitator dan membantu permasalahan masyarakat dalam proses pemberdayaan ternyata menjadi anggota kelompok tani. Hal ini menyebabkan proses belajar dari pengalaman (*experience base learning process*) dalam kegiatan RHL kritis hanya didominasi oleh sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi, yaitu tepatnya pengurus kelompok tani yang sebagian besar aparat desa. Sedangkan masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan masyarakat yaitu petani miskin dan terpinggirkan kurang

mengalami peningkatan kapasitas karena partisipasinya rendah. Menurut Soetomo (2006), dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, program-program yang dilakukan bukan saja mengakomodasi kepentingan pemimpin dan elit lokal, melainkan juga kepentingan masyarakat pada tingkat bawah, karena masyarakat telah ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan kemampuan ini tidak dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui partisipasi dan interaksi dalam proses pengambilan keputusan dan aktivitas bersama untuk melaksanakan keputusan tersebut.

KT Sejahtera, sebagai kelompok, merupakan kelembagaan bentukan baru dari kepengurusan yang kebanyakan aparat pemerintah desa yang secara formal diberi fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan RHL dan memfasilitasi pengambilan keputusan dari bawah. Kenyataannya, partisipasi masyarakat bawah adalah rendah dalam kegiatan RHL kritis yang dilakukan Dinas Kehutanan Ciamis dan ITTO. Hal ini disebabkan kelembagaan kelompok tani tersebut tidak mengakar dalam kehidupan masyarakat dan cenderung lebih berorientasi ke atas. Strategi pembangunan yang memanfaatkan proses belajar sosial berarti juga telah memanfaatkan energi kreatif, pengetahuan dan kearifan lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah (Soetomo, 2006).

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses persiapan sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan RHL di Desa Cisaga berlangsung melalui:
 - a. Sosialisasi tentang RHL kritis dengan pembangunan hutan rakyat kepada aparat pemerintah Desa Cisaga dan perwakilan tokoh masyarakat
 - b. Pendampingan dalam kelembagaan yaitu pembentukan Kelompok Tani Sejahtera sebagai respon terhadap keberadaan kegiatan RHL dengan sebagian pengurus adalah aparat pemerintah Desa Cisaga, pembentukan AD/ART, administrasi kelompok, pengembangan kelompok tani melalui pembuatan proposal kegiatan kelompok tani.
 - c. Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui pelatihan manajemen kelompok tani, pemanenan dan administrasi hutan rakyat, pembibitan, penanaman dan administrasi kehutanan serta sistem monitoring dan evaluasi kehutanan.
 - d. Penghantaran sumber daya untuk mendorong aktivitas dan prakarsa masyarakat dilakukan dengan mendirikan persemaian permanen untuk suplai bibit ke desa – desa model dan bantuan permodalan sebesar Rp. 25.000.000,00 yang diantarkan ke Desa Cisaga untuk kegiatan RHL dan fasilitasi kelompok tani (1 set komputer, 1 unit printer, dan 1 software Map Info sebagai alat sistem monitoring dan evaluasi RHL).
2. Masyarakat Kelompok Tani Sejahtera di Desa Cisaga yang mengerti tujuan kegiatan RHL (89,47%), yang berpendapat bahwa kegiatan RHL sudah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat (84,21%), dan yang menyatakan bahwa kegiatan RHL memberikan manfaat ekonomi/penambahan penghasilan masyarakat (100%).

3. Tingkat partisipasi masyarakat Kelompok Tani Sejahtera di Desa Cisaga dalam pelaksanaan kegiatan RHL adalah rendah (tidak berpartisipasi dan pasif) sebesar 47,37%, sedang (material dan fungsional) sebesar (15,79%) dan tinggi (mobilisasi diri) sebesar 36,84%.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan RHL adalah dalam hal kesadaran lingkungan, ilmu dan wawasan di bidang kehutanan, ketrampilan bidang kehutanan, kerja berkelompok dan jaringan kerja.

4.2. Saran

1. Sosialisasi dan kajian pedesaan hendaknya melibatkan keseluruhan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan kegiatan RHL yaitu masyarakat petani miskin. Pembentukan kelompok tani hendaknya memperhatikan unit sosiogeografis aksi kolektif dan organisasi sosial dengan keanggotaan lebih mengutamakan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan sehingga bisa mengakar dan melembaga dalam kehidupan masyarakat.
2. Mengembalikan fungsi administrasi lokal (pemerintah desa dan Petugas Garis Depan) sebagai sistem luar dalam *Local Social Sistem (LSC)* yang bertugas sebagai fasilitator dan menjembatani dalam akses sumberdaya dari luar bagi *Local Community (L/C)* dalam program pemberdayaan.
3. Program “Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Dengan Melibatkan Masyarakat Lokal” hendaknya bukan sekedar “pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan” tetapi harus menunjukkan “pendekatan partisipatoris” yaitu sebuah metode untuk mengantar komunitas miskin menjadi pelaku pembangunan

5. Daftar Pustaka

- Anonim, 2008, *Completion Report. Rehabilitation of Degraded Forest Land Involving Local Communities In West Java Indonesia*. ITTO Project PD 271/04 Rev. 3(F). March 1st, 2001-May31st, 2008. Forestry Service of Ciamis Distric Ciamis, west Java, Indonesia. Ciamis
- Kadir.W, A., 2007, *Pengembangan Social Forestry Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Borisallo*, Thesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar, Tidak Dipublikasikan.
- Kelompok Tani Sejahtera, 2009, *Selayang Pandang KT Sejahtera*, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Ciamis.
- Moleong.L.J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya. Bandung.
- Pemerintah Desa Cisaga, 2009, *Monografi Desa Cisaga*, Pemerintah Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Ciamis.
- PSKMP, 2002, *Participatory Local Social Development Planning (PLSDP)*, Modul 1 Konsep dan Kerangka Pembangunan Sosial Lokal Partisipatoris, PSKMP-UNHAS, 2002.
- Salman, Darmawan, 2005, *Pembangunan Partisipatoris*. Modul Konsentrasi Manajemen Perencanaan Program Studi Administrasi Pembangunan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sukrianto, T., 2007, *Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis (2006-2025)*, Makalah Utama Prosiding Workshop “Perencanaan RHL Berbasis Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Suatu Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kehutanan yang Akurat dan Tepat di Kabupaten Ciamis”, yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2007 di Ciamis.